



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI
Jl. Setia Budi No. 34 A Telp (0295) 381842 Pati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun dan dapat disajikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program dalam mencapai sasaran strategis.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP diharapkan dapat memberikan gambaran prinsip-prinsip “*good governance*” untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak yang berkepentingan.

Pati, 7 Februari 2025
Inspektur Daerah Kabupaten Pati



AGUS EKO WIBOWO, S.H., S.Farm., Apt., M.M.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 198208282006041009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati selama setahun dalam mencapai sasaran strategis dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati diukur data kinerjanya setelah berakhirnya tahun anggaran 2024 dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator kinerja tujuan yang dicapai :

- Maturitas SPIP level 3, capaian kinerja 100%,
- Indeks Efektifitas Pengendalian Tingkat Korupsi (IEPTK) level 3, capaian kinerja 150%,
- Tingkat Kapabilitas APIP Level 3, capaian kinerja 100%.

Indikator kinerja sasaran yang dicapai :

- Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3 sebanyak 100%, capaian kinerja 133,33%,
- Persentase OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3 sebanyak 57%, capaian kinerja 142,50%,
- Persentase ketercapaian komponen kapabilitas APIP Level 3 sebesar 100%, capaian kinerja 133,33%

Indikator kinerja program yang dicapai :

- Persentase penurunan temuan sebesar 3%, capaian kinerja 100%,
- Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 95%, capaian kinerja 100%,

- Jumlah OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dengan capaian kinerja 0%, sampai dengan tahun 2024 berakhir, pada Pemerintah Kab. Pati belum ada perangkat daerah yang lolos WBK. Hal ini disebabkan karena Pembangunan zona integritas pada Kab. Pati belum fokus pada pemecahan permasalahan utama atau isu strategis unit kerja serta masih ditemukannya syarat pengajuan Zona Integritas yang belum terpenuhi diantaranya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Selain itu berbagai inovasi yang sudah dibuat belum bisa meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan pada Masyarakat.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Pati Th. 2024.....	12
Tabel 2.2 Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	12
Tabel 2.3 Indikator Tujuan Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	13
Tabel 2.4 Indikator Sasaran Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	14
Tabel 2.5 Indikator Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	14
Tabel 2.6 Indikator Kegiatan Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	15
Tabel 2.7 Indikator Sub Kegiatan Inspektorat Kab. Pati Th. 2024.....	15
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja tujuan Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	18
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja sasaran Inspektorat Kab. Pati Th. 2024.....	19
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	19
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja kegiatan Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	20
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja sub kegiatan Inspektorat Kab. Pati Th. 2024	21
Tabel 3.7 Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Maturitas SPIP Kab. Pati Tahun 2024.....	22
Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja IEPTK Kab. Pati Tahun 2024.....	25

Tabel 3.9 Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Kab. Pati Tahun 2024.....	26
Tabel 3.10 Perbandingan target dan realisasi capaian Persentase OPD Yang menerapkan SPIP level 3 pada Pemkab. Pati.....	28
Tabel 3.11 Perbandingan target dan realisasi capaian Persentase OPD Yang menerapkan IEPTK level 3 pada Pemkab. Pati.....	29
Tabel 3.12 Perbandingan target dan realisasi capaian Persentase ketercapaian komponen kapabilitas APIP level 3.....	31
Tabel 3.13 Target, realisasi output dan serapan anggaran program/keg/ Suk keg Inspektorat Daerah Kab Pati Tahun 2024.....	32
Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 3.15 Perbandingan capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 3.16 Perbandingan capaian kinerja program/keg/sub. keg. Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 3.17 Perbandingan Hasil Survey SPI tahun 2021-2024	45
Tabel 3.18 Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020-2023.....	46
Tabel 3.19 Penanganan pengaduan masyarakat tahun 2021-2024.....	48
Tabel 3.20 Pelayanan Jasa E- Consulting dan NONGKI tahun 2020-2024.....	49
Tabel 3.21 Realisasi Capaian MCP KPK tahun 2020-2024.....	49

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	
EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
1) Capaian Kinerja Organisasi	17
2) Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP.....	57

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Murni 2024;
2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
3. Laporan Capaian Kinerja Tw. 4 tahun 2024
4. Rencana Kerja Tahunan 2024;
5. Evaluasi Renja TW. 4 Th. 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan auditor internal Bupati yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mendampingi Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dan meyakini operasional pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan merupakan satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan dan fektivitas pencapaian penyelenggaraan tugas dan fingsi intansi pemerintah.

Dengan berjalannya waktu dan tuntutan yang dihadapi, APIP sekarang ini diharapkan bukan hanya bisa menyalahkan (*watchdog*) tetapi lebih kearah pendampingan (*consulting*). APIP merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Dengan adanya perubahan fungsi tersebut diperlukan adanya pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kab. Pati sangat diharapkan independen dari pengaruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan koordinasi dengan aparaturn pemerintah yang terkait dalam

melaksanakan pengawasan agar terdapat keterpaduan dan saling memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

a. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kedudukan Inspektorat Daerah Kab. Pati

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kab. Pati merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

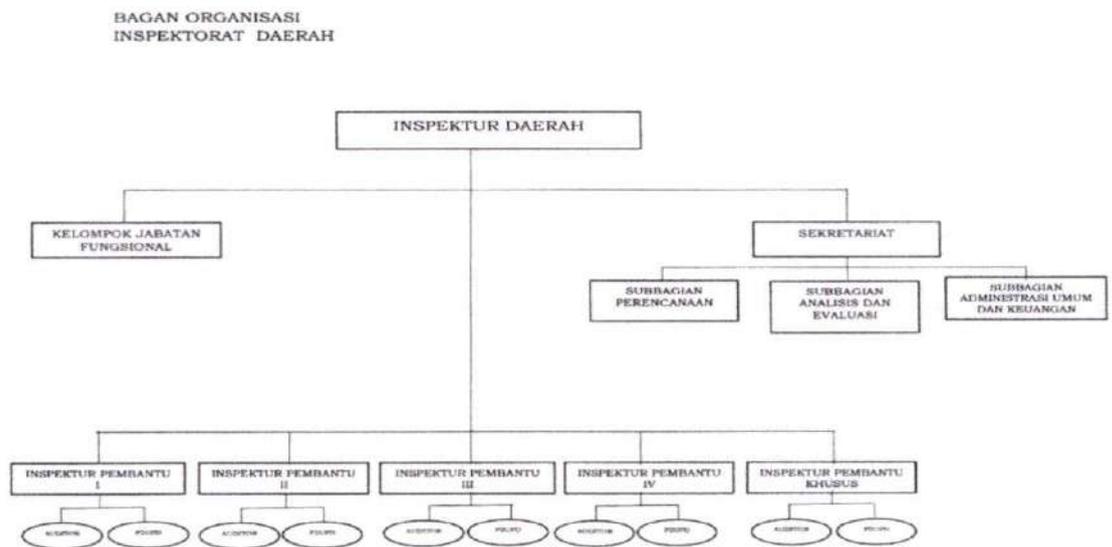
4. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari:

- a. Inspektur Daerah :
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbag. Perencanaan

- 2) Subbag. Analisis dan Evaluasi
- 3) Subbag. Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab.Pati

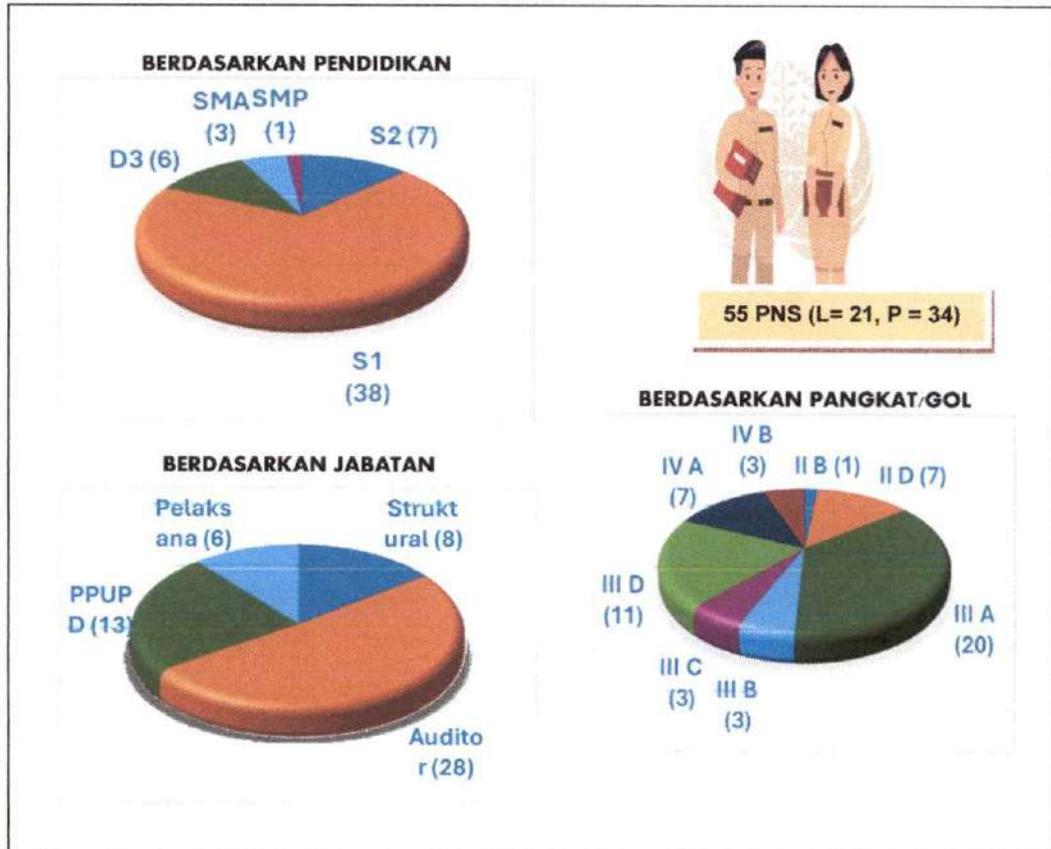


5. Sumber Daya Manusia

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kab. Pati memiliki 57 sumber daya aparatur dan Tahun 2024 memiliki 55 sumber daya aparatur.

Gambar 2

Sumber daya kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun



6. Sarana Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Bangunan sebanyak 2 buah
 - Gedung perkantoran
 - Gedung Arsip
- b. Sarana Pendukung Administrasi berupa
 - Komputer, Laptop dan printer
 - Buku-buku peraturan perundang-undangan yang mendukung tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Pati

- c. Sarana Mobilitas didukung oleh:
 - Kendaraan Roda empat sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Kendaraan Roda dua sebanyak 24 (dua puluh empat) unit.
7. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
- Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan mencapai Kinerjanya, Inspektorat Daerah didukung 3 (tiga) program prioritas beserta kegiatannya sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.**
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- Pengawasan Kinerja Pemerintah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- 2) Pendampingan dan Asistensi.
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

8. Isu-Isu Strategis

Adanya pengaruh berbagai unsur seperti politik, ekonomi, social budaya dan keamanan dapat mempengaruhi kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang membawa pengaruh positif maupun negatif yang memunculkan berbagai isu, permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati saat ini dan di tahun mendatang terurai sebagai berikut :

“Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)” dengan prioritas program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
9. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati :
- Tantangan yang dihadapi :
- a. Optimalisasi penyelenggaraan pengawasan;
 - b. Optimalisasi penegakan integritas di perangkat daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi PPRG di daerah.

Peluang yang ada sebagai berikut :

- a. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
- b. Terbentuknya AAIPI (Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia) yang bertujuan meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah guna mewujudkan peran APIP yang efektif, meningkatkan Kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik menjembatani berbagai latar belakang APIP untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang dan selaras.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

10. Strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah

Adapun strategi yang digunakan adalah :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- b. Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengawasan kinerja dan keuangan pemerintah daerah,
- b. Melaksanakan gelar pengawasan setiap tahun,
- c. Melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah maupun pendampingan asistensi penilaian reformasi birokrasi,
- d. Melaksanakan pemantauan terkait jumlah OPD yang menerapkan SPIP di Level 3,
- e. Melaksanakan pemantauan terkait jumlah OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3,
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tupoksi.
- g. Melaksanakan reviu dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Melaksanakan pendampingan dan asistensi,
- i. Melaksanakan fasilitasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi,
- j. Peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Pati.

11. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kab. Pati Nomor: 730/KH/025.2/2024 tanggal 3 Juni 2023 sudah ditindak lanjuti semua dan selesai (dokumen terlampir).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 Inspektorat Daerah Kab. Pati mempunyai tujuan yang akan dicapai diakhir tahun perencanaan yaitu:

"Terwujudnya Pengawasan yang berkualitas "

Dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Level 3,
- b. Indeks Efektifitas Pengendalian Tingkat Korupsi (IEPTK) di Level 3,
- c. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Level 3.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

"Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah"

Dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3
- b. Persentase OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3
- c. Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP Level 3

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Pati

Untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ingin di capai.

Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pati tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan pengawasan berkualitas	Maturitas SPIP – Level 3
	IEPTK – Level 2
	Tingkat Kapabilitas APIP – Level 3
Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIPdi Level 3 – 75%
	Persentase OPD yang menerapkan IEPTK dilevel 3 – 40%
	Persentase ketercapaian komponen kapabilitas APIP Level 3- 75%

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas didukung beberapa Program prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024

No.	Uraian Program	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	Program Prioritas	
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.722.118.450,-
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1.543.714.500,-
B.	Program Pendukung	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	10.761.897.050,-
Total anggaran		17.027.730.000,-

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan antara kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan Kepala Daerah dan merupakan wahana untuk mengetahui apa yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun dan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dengan ditetapkannya Perencanaan Kinerja diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan OPD lebih baik sehingga tidak ada program dan kegiatan yang tidak terarah.

Adapun uraian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 2.3
Indikator Tujuan Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENGUKURAN
Terwujudnya pengawasan berkualitas	Maturitas SPIP	Terpenuhinya komponen pernyataan penilaian maturitas SPIP di level 3
	IEPTK	Terpenuhinya komponen pernyataan penilaian IEPTK di level 3
	Tingkat kapabilitas APIP	Terpenuhinya komponen pernyataan penilaian tingkat kapabilitas APIP di level 3

Table 2.4
Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENGUKURAN
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP di level 3 dibagi Jumlah OPD di Pemkab. Pati dikali 100%
	Persentase OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3	Jumlah OPD yang menerapkan IEPTK di level 3 dibagi Jumlah OPD di Pemkab. Pati dikali 100%
	Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP Level 3	Ketercapaian komponen penilaian Kapabilitas Apip di level 3 dibagi total semua komponen penilaian Kapabilitas APIP Level 3

Table 2.5
Indikator Program Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENGUKURAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan	Selisih temuan dengan tahun kemarin dibagi jumlah temuan tahun kemarin dikali 100%
	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi pengawasan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah keseluruhan rekomendasi pengawasan dikali 100%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.	Jumlah OPD yang berpredikat WBK	Jumlah OPD yang berpredikat WBK

Table 2.6
Indikator Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENGUKURAN
Penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah temuan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	Total jumlah temuan hasil pengawasan
	Jumlah laporan revidu dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	Jumlah laporan revidu dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah lap kerugian negara yang tertangani	Jumlah laporan kerugian negara yang tertangani
	Jumlah temuan PDTT	Jumlah temuan PDTT
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang diasistensi	Jumlah OPD yang diasistensi

Table 2.7
Indikator Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PENGUKURAN
Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Revidu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revidu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revidu Laporan Kinerja
Revidu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revidu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revidu Laporan Keuangan
Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PENGUKURAN
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi penegakan integritas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan pencapaian hasil. Penilaian kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja dapat dijadikan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi. Penilaian kinerja berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Pati digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Ket.
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2	76% ≤ 90%	Tinggi	T
3	66% ≤ 75%	Sedang	S
4	51% ≤ 65%	Rendah	R
5	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Terwujudnya pengawasan berkualitas	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Tinggi
	IEPTK	Level 2	Level 3	150%	Sangat Tinggi
	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kab. Pati tahun 2024 menunjukkan bahwa semua indikator tercapai semuanya dengan peringkat capaian kinerja sangat tinggi.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	75%	100%	133.33%	Sangat Tinggi
	Persentase OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3	40%	57%	142.50%	Sangat Tinggi
	Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APiP Level 3	75%	100%	133,33%	Sangat Tinggi

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Pati tahun 2024 menunjukkan bahwa semua IKU indikator tercapai semuanya dengan peringkat capaian kinerja sangat tinggi.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan	3%	5%	166.67%	Sangat Tinggi
	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%	Sangat Tinggi
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.	Jumlah OPD yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	1	0	0	Sangat Rendah

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Dari 3 (tiga) Indikator Program Inspektorat Daerah Kab. Pati tahun 2024 menunjukkan bahwa 2 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi dengan capaian 166.67% dan 100%, tetapi ada 1 (satu) indikator

program ditahun 2024 yang tidak tercapai yaitu jumlah OPD yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) karena sampai dengan tahun 2024 berakhir, pada Pemerintah Kab. Pati belum ada perangkat daerah yang lolos WBK. Hal ini disebabkan karena Pembangunan zona integritas pada Kab. Pati belum fokus pada pemecahan permasalahan utama atau isu strategis unit kerja serta masih ditemukannya syarat pengajuan Zona Integritas yang belum terpenuhi diantaranya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Selain itu berbagai inovasi yang sudah dibuat belum bisa meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan pada Masyarakat.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah temuan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	200	882	441%	Sangat Tinggi
	Jumlah laporan reвью dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	4	9	225%	Sangat Tinggi
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah lap kerugian negara yang tertangani	1	0	0	Sangat Rendah
	Jumlah temuan PDDT	50	52	104%	Sangat Tinggi
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12	2	16.67%	Sangat Tinggi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	1	1	100	Sangat Tinggi
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang diasistensi	30	49	163,33%	Sangat Tinggi

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sub. Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5	5	100%	Sangat Tinggi
Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41	41	100%	Sangat Tinggi
Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	4	100%	Sangat Tinggi
Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	4	100%	Sangat Tinggi
Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	259	259	100%	Sangat Tinggi
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	434	434	100%	Sangat Tinggi
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	12	100%	Sangat Tinggi
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	64	64	100%	Tinggi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	5	100%	Sangat Tinggi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	100	100	100%	Sangat Tinggi
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	49	163.33%	Sangat Tinggi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	56	56	100%	Sangat Tinggi

Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Korupsi	Pemberantasan Korupsi				
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30	49	163.33%	Sangat Tinggi

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah

3.2.1 Maturitas SPIP di Kab. Pati

Maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern. Pengukuran tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapaian target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tabel 3.7
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Maturitas SPIP Kab.Pati Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	ST

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Uraian Kinerja

Karakteristik Maturitas SPIP pada Pemerintah Kab. Pati telah terpenuhi pada level 3 (terdefinisi) yang berarti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasikan pengendaliannya telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

Secara garis besar penilaian maturitas SPIP meliputi:

- a. Hasil penilaian atas komponen penetapan tujuan, hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kab. Pati telah mampu merumuskan kinerja dan indikator serta target dan juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut tetapi masih ada beberapa permasalahan yang harus dilakukan perbaikan yaitu:
 - Sasaran strategis Pemda, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan belum sepenuhnya tepat,
 - Sasaran yang belum sepenuhnya selaras dengan sasaran diatasnya,
 - Indikator yang tidak cukup untuk menggambarkan sasaran, tidak spesifik, *overlapping* dengan indikator diatasnya dan tidak relevan,
 - Target kinerja yang kurang mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kurang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timeliness)*.
- b. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses, dapat disimpulkan bahwa Upaya pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kab. Pati sampai dengan level aktivitas sudah cukup memadai, serta telah didukung dengan implementasi manajemen risiko dan pengendalian korupsi pada seluruh perangkat daerah, namun masih ada yang perlu dilakukan perbaikan yaitu:
 - Pimpinan daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya menggunakan informasi register resiko dan rencana tindak pengendalian dalam pengambilan Keputusan /kebijakan,
 - Proses manajemen risiko masih cenderung didominasi oleh sub. bag. perencanaan sehingga kesadaran pegawai dalam penyelenggaraan, pembinaan dan internalisasi

- manajemen risiko pada perangkat daerah sehingga budaya sadar risiko belum terbangun,
- Perangkat daerah belum sepenuhnya mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko kemitraan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi,
 - Perangkat daerah belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis Pemda yang dimulai sejak proses perencanaan,
 - Pemantauan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilakukan secara terjadwal dan berkala,
- c. Hasil Penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan, hasil penilaian menunjukkan bahwa Pemda telah mengupayakan pencapaian tujuan dan kinerja secara optimal, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan yaitu:
- Terdapat indikator yang tidak cukup menggambarkan ketercapaian kinerja sasaran strategis Pemda, sasaran strategis perangkat daerah, sasaran program, sasaran kegiatan serta keandalan data capaian perangkat daerah,
 - Masih terdapat temuan yang berulang,
 - Masih terdapat temuan terkait asset,
 - Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan

3.2.2 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi. IEPK dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja
IEPK Kab. Pati Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
IEPTK	Level 2	Level 3	150%	ST

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Sesuai laporan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP/702/PW11/3/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan bahwa nilai IEPTK diangka 3.00 atau level 3. Meskipun capaian kinerja sudah mencapai 150% (Sangat Tinggi) masih diperlukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan nilai tersebut yaitu:

Perangkat daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian risiko dan belum dilakukan analisis dan *Assessment* risiko kecurangan.

3.2.3 Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan

kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana pasal 11 PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tabel 3.9
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja
Tingkat Kapabilitas APIP Kab. Pati Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Tingkat Kapabilitas APIP di level 3	Level 3	Level 3	100%	ST

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Uraian Kinerja

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Kapabilitas APIP terdiri dari 2 (dua) komponen yang masing-masing terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enable*) yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia
 - b. Praktik profesional

- c. Akuntabilitas dan manajemen kinerja
 - d. Budaya dan hubungan organisasi
 - e. Struktur tata kelola
2. Komponen aktivitas pengawasan (*Delivery*) dan kualitas pengawasan (*Result*) yang terdiri dari:
- a. Peran dan layanan

Berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.09.03/LHP-344/PW11/6/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kab. Pati menyebutkan bahwa dari 6 (enam) elemen berada di level 3 sehingga tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Pati tahun 2024 diangka 3,00 atau di Level 3.

Langkah perbaikan yang masih harus dilakukan Inspektorat Daerah Kab. Pati untuk meningkatkan nilai Kapabilitas adalah:

- a. Melaksanakan penguatan dukungan kepala daerah untuk pelaksanaan tugas terutama terkait sumberdaya manusia, anggaran dan regulasi/kebijakan,
- b. Memastikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kab. Pati.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Pati

3.3.1 Persentase PD yang menerapkan SPIP Level 3

Kedudukan Inspektorat Daerah Kab. Pati sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Dengan pokok permasalahan Strategi tata kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi.

Tingkat Maturitas SPIP dijadikan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kab. Pati menunjukkan bahwa APIP

(Aparat Pengawas Internal Pemerintah) telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam mengawal pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi Level Maturitas SPIP di Kab. Pati menunjukkan bahwa pengendalian internalnya sudah cukup baik sehingga dapat memperkecil terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.10
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Menerapkan SPIP Level 3 pada Pemkab. Pati Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase OPD yang menerapkan SPIP level 3	75%	100%	133.33%	ST

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Uraian Kinerja

Pelaksanaan SPIP Diukur Dari 25 sub unsur Fokus Dan Indikator Maturitas Yang Terdiri Dari: Penegakan Integritas Dan Nilai Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan Yang Kondusif, Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat, Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM, Perwujudan Peran APIP Yang Efektif, Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Insatansi Pemerintah Terkait, Identifikasi Resiko, Analisis Resiko, Reviu Kinerja, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian Fisik Atas Aset, Penetapan Dan Reviu Indikator, Pemisahan Fungsi, Otoritas Transaksi Dan Kejadian Penting, Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu, Pembatasan akses Atas Sumber Daya Dan Catatan, Akuntabilitas Pencatatan Dan Sumber Daya, Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Serta Transaksi Dan Kejadian Penting, Informasi,

Penyelenggaraan Komunikasi Yang Efektif, Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah.

Capaian kinerja Tahun 2024 atas IKU tersebut telah mencapai 133.33% karena dari target yang telah ditetapkan realisasinya lebih tinggi. Dari 37 perangkat daerah yang menerapkan SPIP dilevel 3 sampai dengan akhir tahun 2024 semua perangkat daerah (49) sudah melaksanakan SPIP di level 3.

Dengan keluarnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Penilaian maturitas SPIP ini mencakup beberapa unsur di antaranya SPIP itu sendiri, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP. Selain itu penilaian juga terintegrasi mulai dari perencanaan, membangun unsur pengendalian, dan pencapaian tujuan. Dengan demikian penilaian maturitas SPIP ini akan memberikan gambaran tata kelola pemerintahan yang holistik, tidak parsial. Hal ini lah yang harus terus dikawal Inspektorat Daerah Kab. Pati meskipun semua perangkat daerah Tingkat SPIP nya sudah dilevel 3 harapannya bisa naik ke level berikutnya (Level 4).

3.3.2 Persentase OPD yang menerapkan IEPTK dilevel 3

Tabel 3.11
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja
Persentase OPD Yang Menerapkan IEPK Level 3 pada
Pemkab. Pati Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase OPD yang menerapkan IEPK Level 3	40%	57%	142,86%	ST

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Uraian Kinerja:

Sampai dengan akhir tahun 2024 OPD yang sudah menerapkan IEPK di dilevel 3 yaitu 28 (dua puluh delapan) OPD yaitu semua perangkat daerah selain kecamatan.

Kedepan Inspektorat Daerah Kab. Pati akan mendorong Pemda maupun perangkat daerah untuk mengimplementasikan IEPK dilevel 3.

3.3.3 Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP level 3

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana pasal 11 PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan c.

Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tabel 3.12
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP Level 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP level 3	75%	100%	133,33%	ST

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Uraian Kinerja

Berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.09.03/LHP-344/PW11/6/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kab. Pati menyebutkan bahwa dari 6 (enam) elemen berada di level 3 sehingga tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Pati tahun 2024 diangka 3,00 atau di Level 3.

Langkah perbaikan yang masih harus dilakukan Inspektorat Daerah Kab. Pati untuk meningkatkan nilai Kapabilitas adalah:

- a. Melaksanakan penguatan dukungan kepala daerah untuk pelaksanaan tugas terutama terkait sumberdaya manusia, anggaran dan regulasi/kebijakan,
- b. Memastikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kab. Pati.

3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Pati

Untuk mencapai tujuan dan sasarannya Inspektorat Daerah Kab. Pati didukung oleh 3 program, 12 kegiatan dan 38 sub. kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Target, Realisasi Output, Dan Serapan Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kab/Kota	100%	100%	100%	10.761.897	10.192.850	94.71%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11	100%	180.646	128.599	71.19%
Sub keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	8	100%	170.447	118.825	69,71%
Sub keg Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA SKPD	2	2	100%	5.049	4.859	96.24%
Sub keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laopran evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1	100%	5.150	4.915	95.43%
Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83	83	100%	6.067.505	5.782.285	95.30%
Sub keg Penyediaan	Jumlah orang yang menerima	59	59	100%	5.998.419	5.714.514	95.27%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
Gaji dan tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN						
Sub keg Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasilpenyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	12	100%	23.755	22.862	96,24%
Sub keg Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	12	100%	45.332	44.909	99,07%
Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian BMD pada perangkat daerah	19	19	100%	43.576	43.474	99.77%
Sub keg Pengamanan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	7	7	100%	25.000	24.998	99,99%
Sub keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD	12	12	100%	18.576	18.475	99,46%
Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	59	59	100%	888.843	794.410	89,38%
Sub keg Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	59	59	100%	90.000	89.799	99,75%
Sub keg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	59	59	100%	138.100	110.831	80,25%
Bimbingan teknis	Jumlah orang yang mengikuti	31	31	100%	660.743	593.800	89,87%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
implementasi peraturan perundang-undangan	bimtek implentasi peraturan perundang-undangan						
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan	95.210	95.210	100%	690.296	649.926	94,15%
Sub keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	171	171	100%	16.660	15.899	95,43%
Sub keg Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25.759	25.759	100%	420.904	407.881	96,91%
Sub keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah psketbarang cetakan dan penggandaan yang disediakan	69.148	69.148	100%	40.342	36.985	91,68%
Sub keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	100%	7.440	7.200	96,77%
Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	120	100%	204.950	181.960	88,78%
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	75	75	100%	2.056.475	1.984.243	96,49%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	13	13	100%	609.000	560.738	92,08%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
	disediakan						
Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	62	62	100%	1.433.975	1.410.525	98,36%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	1	100%	13.500	12.980	96,15%
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	100%	100%	100%	478.671	470.734	98,34%
Sub keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100%	9.000	8.340	92,66%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	100%	150.000	144.510	96,34%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	100%	74.100	73.043	98,57%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	100%	245.571	244.841	99,70%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32	32	100%	355.885	339,182	95,31%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
Sub keg Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	31	31	100%	197.835	183.056	92,53%
Sub keg Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100%	158.050	156.126	98,78%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan	3%	3%	100%	4.722.118	4.449.046	94,22%
	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%			
Keg. Penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah temuan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	200	882	441%	3.766.522	3.652.637	96,98%
	Jumlah laporan review dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	4	9	225%			
Sub. keg Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5	5	100%	60.000	56.638	94,40%
Sub. keg Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41	41	100%	360.000	359.180	99,77%
Sub. keg Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil	4	4	100%	80.944	80.343	99,26%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
	Reviu Laporan Kinerja						
Sub. keg Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	4	100%	30.978	30.458	98,32%
Sub. keg Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	259	259	100%	1.933.200	1.922.312	99,44%
Sub. keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	434	434	100%	1.301.400	1.203.707	92,49%
Keg. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah lap kerugian negara yang tertangani	1	1	100%	955.597	796.409	83,34%
	Jumlah temuan PDDT	50	52	104%			
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12	2	16,67%			
Sub. keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	0	0	35.000	33.761	96,46%
Sub. keg Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	52	104%	920.597	762.648	82,84%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah OPD yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	20	0	0	1.543.715	1.275.319	82,61%
Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan	1	1	100	175.380	134.395	76,63%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (000)	Realisasi (000)	Capaian (%)
Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	dan bidang fasilitas pengawasan						
Sub. keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	5	100%	75.650	35.145	46,46%
Sub. keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	100	100	100%	99.730	99.250	99,52%
Keg. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang diasistensi	30	49	163,3%	1.368.334	1.140.924	83,38%
Sub. keg Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	49	163,3%	368.202	290.375	78,86%
Sub. keg Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	56	56	100%	563.738	451.754	80,14%
Sub. keg Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30	49	163,3%	436.394	398.795	91,38%

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Terwujudnya pengawasan berkualitas	Maturitas SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
	IEPTK	0	0	0	0	150%
	Tingkat kapabilitas APIP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Tabel 3.15
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	100%	100%	100%	114,28%	133,33%
	Persentase OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3	0	0	0	106,12%	142,50%
	Persentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP Level 3	100%	100%	100%	133,34%	133,33%

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub
kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laopran evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian BMD pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Pengamanan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Sub keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	100%	100%	100%		100%
Sub keg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
Bimbingan teknis implemmentasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implentasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logostik kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah psketbarang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumiah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					100%
Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg	Jumlah gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan	100%	100%	100%	100%	166,67%
	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	102,8%	100%
Keg. Penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah temuan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	100%	100%	100%	560,5%	441%
	Jumlah laporan review dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	225%
Sub. keg Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%
Keg. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah lap kerugian negara yang tertangani	100%	100%	100%	100%	0
	Jumlah temuan PDDT	100%	100%	100%	110%	104%
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	150%	16,67%
Sub. keg Penanganan Penyelesaian	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian	100%	100%	100%	100%	0

Program / Kegiatan /Sub keg	Indikator	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Kerugian Negara/Daerah	Negara/Daerah					
Sub. keg Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	85,36%	100%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah OPD yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	0	0	0	0	0
Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100%
Keg. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang diasistensi	100%	100%	100%	116%	163,33%
Sub. keg Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	272%	163,33%
Sub. keg Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	100%	100%	100%	100%
Sub. keg Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	100%	100%	416%	163,33%

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

3.4 Kinerja Lain-lain

Inspektorat Daerah Kab.Pati mempunyai tugas tambahan dalam menindaklanjuti kebijakan / program nasional dalam rangka penguatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pati meliputi:

1. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Tahun 2023 Hasil SPI Kab. Pati adalah 70,97.

TABEL 3.17
Perbandingan Hasil Survey SPI Tahun 2021-2024

KETERANGAN	2021	2022	2023	2024
SPI	78,81	78,25	80,75	77,85

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

2. Evaluasi Implementasi Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Keputusan Inspektur Kab. Pati Nomor 700/809/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Pati, Inspektorat Daerah telah melaksanakan evaluasi tahun 2020 - 2022 dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 3.18
Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 – 2023

No.	OPD	2020		2021		2022		2023	
		HASIL	KATEGORI	HASIL	HASIL	KATEGORI	HASIL	KATEGORI	HASIL
1	Sekretariat Daerah	77,63	BB	78,59	77,63	BB	78,59	79.15	BB
2	Sekretariat Dewan	77,17	BB	78,53	77,17	BB	78,53	78.65	BB
3	Inspektorat	78,88	BB	79,57	78,88	BB	79,57	79.75	BB
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,69	BB	76,39	75,69	BB	76,39	76.55	BB
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	78,70	BB	78,84	78,70	BB	78,84	79.10	BB
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	78,72	BB	78,76	78,72	BB	78,76	79.25	BB
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78,77	BB	78,83	78,77	BB	78,83	78.95	BB
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	76.14	BB	78,25	76.14	BB	78,25	78.40	BB
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,03	BB	77,03	76,03	BB	77,03	77.65	BB
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	78,52	BB	79,32	78,52	BB	79,32	79.80	BB
11	Dinas Pertanian	78,83	BB	79,81	78,83	BB	79,81	79.80	BB
12	Dinas Sosial P3AKB	78,47	BB	78,77	78,47	BB	78,77	79.10	BB
13	Dinas Kesehatan	78,32	BB	79,29	78,32	BB	79,29	79.35	BB
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	78,05	BB	78,25	78,05	BB	78,25	78.50	BB
15	Dinas Koperasi dan UKM	78,83	BB	79,15	78,83	BB	79,15	79.55	BB
16	Dinas Lingkungan Hidup	78,05	BB	78,39	78,05	BB	78,39	78.80	BB
17	Dinas Ketahanan Pangan	76,82	BB	77,28	76,82	BB	77,28	77.55	BB
18	Dinas DPMPSTP	78,48	BB	78,99	78,48	BB	78,99	79.50	BB
19	Dinas Perhubungan	78,48	BB	79,43	BB	79,60	BB	79.60	BB

No.	OPD	2020		2021		2022		2023	
		HASIL	KATEGORI	HASIL	HASIL	KATEGORI	HASIL	KATEGORI	HASIL
20	Dinas Tenaga Kerja	78,26	BB	79,44	BB	79,50	BB	79.50	BB
21	Satpol PP	78,71	BB	79,29	BB	79,55	BB	79.65	BB
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	78,35	BB	78,60	BB	78,70	BB	78.70	BB
23	Dinas Perumahan dan Pemukiman	78,40	BB	79,38	BB	79,45	BB	79.50	BB
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	78,82	BB	78,90	BB	79,20	BB	79.20	BB
25	BPKAD	78,63	BB	78,69	BB	79,00	BB	79.00	BB
26	BAPPEDA	78,94	BB	81,00	A	81,10	A	81.15	A
27	RSUD Kayen	74,22	BB	Merupakan UPT Daerah yang secara pelaporan menginduk di Dinas Kesehatan Kab. Pati					
28	RSUD RAA Soewondo	76,16	BB						
29	Badan Kesbangpol	76,15	BB	79,02	BB	79,45	BB	79.45	BB
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76,00	BB	77,83	BB	78,00	BB	78.00	BB
31	Kec. Gembong	76,02	BB	77,25	BB	77,65	BB	77.65	BB
32	Kec. Jakenan	76,71	BB	77,25	BB	77,50	BB	77.50	BB
33	Kec. Gunungwungkal	75,95	BB	76,77	BB	76,80	BB	76.95	BB
34	Kec. Kayen	72,79	BB	73,09	BB	73,30	BB	73.45	BB
35	Kec. Tayu	74,91	BB	75,28	BB	75,90	BB	76.00	BB
36	Kec. Juwana	75,09	BB	75,21	BB	75,65	BB	75.65	BB
37	Kec. Trangkil	75,37	BB	76,87	BB	77,05	BB	77.05	BB
38	Kec. Batangan	76,27	BB	76,29	BB	76,55	BB	76.55	BB
39	Kec. Winong	74,46	BB	76,10	BB	76,85	BB	77.05	BB

No.	OPD	2020		2021		2022		2023	
		HASIL	KATEGORI	HASIL	HASIL	KATEGORI	HASIL	KATEGORI	HASIL
40	Kec. Margoyoso	75,94	BB	76,65	BB	76,75	BB	76.80	BB
41	Kec. Tlogowungu	73,95	BB	74,58	BB	75,40	BB	75.40	BB
42	Kec. Jaken	71,65	BB	73,38	BB	73,60	BB	74.20	BB
43	Kec. Dukuhseti	72,43	BB	75,29	BB	75,40	BB	75.70	BB
44	Kec. Tambakromo	76,07	BB	76,59	BB	76,95	BB	76.95	BB
45	Kec. Cluwak	77,84	BB	78,14	BB	78,45	BB	78.50	BB
46	Kec. Pucakwangi	75,40	BB	76,38	BB	76,80	BB	76.80	BB
47	Kec. Sukolilo	73,41	BB	76,73	BB	77,15	BB	77.50	BB
48	Kec. Margorejo	71,12	BB	72,53	BB	73,00	BB	73.10	BB
49	Kec. Gabus	73,33	BB	75,14	BB	75,35	BB	75.65	BB
50	Kec. Wedarijaksa	73,29	BB	74,22	BB	74,55	BB	74.55	BB
51	Kec. Pati	71,24	BB	71,97	BB	72,60	BB	72.85	BB

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tabel 3.19
Penanganan pengaduan Masyarakat Tahun 2021-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Pengaduan Masyarakat	8	11	7	2

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

4. Pelayanan Jasa Konsultasi

Tabel 3.20
Pelayanan Jasa E-Consulting dan NONGKI Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
E-Consulting	21	6	6	6	8
Nongki (Nongkrong Ngopi dan Konsultasi)			4	15	12
E-WIS					0
E-WADUL					0

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

5. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

- MCP (Monitoring Centre of Prevention)

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya ada Pemerintah Daerah, KPK RI telah meluncurkan program MCP (Monitoring Centre of Prevention). Implementasi pencegahan korupsi melalui program MCP pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
- c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
- d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Tabel 3.21
Realisasi Capaian MCP KPK Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai MCP KPK	87,28	94,77	95,52	89,27	95,14

Sumber: Subbag. Perencanaan (data yang diolah)

- Inspektorat Daerah Kab. Pati Tahun 2024 juga melaksanakan sosialisasi Anti Korupsi kepada seluruh ASN pada 30 (tiga puluh) Perangkat daerah bukan

kecamatan dan tahun 2025 rencananya akan melaksanakan sosialisasi anti korupsi pada kecamatan.

- Pemerintah Kab. Pati Tahun 2024 dikawal Inspektorat Daerah, Dispermades, Diskominfo dan Kecamatan melaksanakan Pembangunan perluasan Desa Anti Korupsi sebagai tindak lanjut Surat Edaran KPK RI Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Upaya peningkatan pencegahan korupsi daerah. Program ini bertujuan untuk mencegah korupsi ditingkat desa. Kabupaten Pati mengambil 1 (satu) desa untuk masing-masing kecamatan yang dilakukan pembangunan sebagai desa antikorupsi dengan harapan jika sudah berhasil dapat mempengaruhi desa lainnya untuk menjadi desa anti korupsi. Desa yang dilakukan pendampingan sebagai desa anti korupsi sebagai berikut:

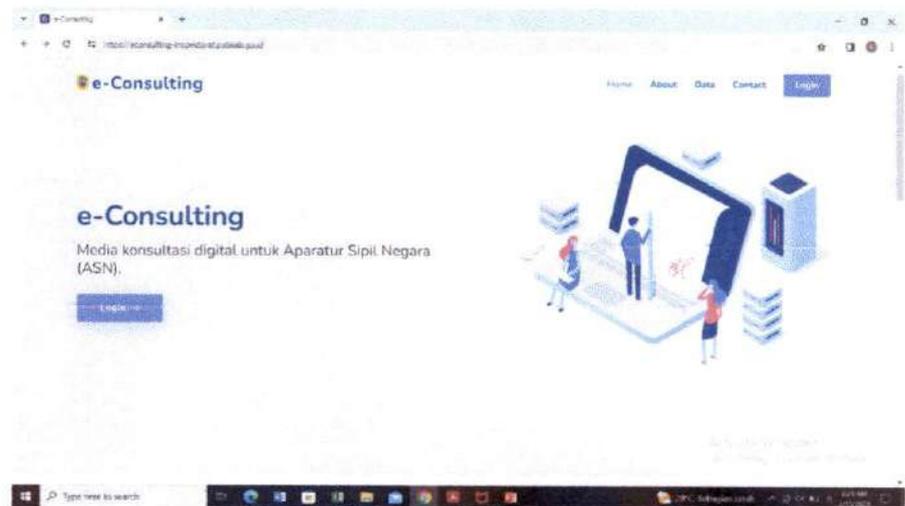
- (1) Desa Baleadi Kec. Sukolilo
- (2) Desa Sinomwidodo Kec. Tambakromo
- (3) Desa Plumbungan Kec. Gabus
- (4) Desa Langenharjo Kec. Margorejo
- (5) Desa Kayen Kec. Kayen
- (6) Desa Bajomulyo Kec. Juwana
- (7) Desa Klayusiwalan Kec. Batangan
- (8) Desa Kepoh Kec. Wedarijaksa
- (9) Desa Ketanen Kec. Trangkil
- (10) Desa Wonosekar Kec. Gembong
- (11) Desa Tambahmulyo Kec. Jakenan
- (12) Desa Grogolsari Kec. Pucakwangi
- (13) Desa Tawangrejo Kec. Winong
- (14) Desa Sumberan Kec. Jaken
- (15) Desa Regaloh Kec. Tlogowung
- (16) Desa Kalikalong Kec. Tayu

- (17) Desa Ngagel Kec. Dukuhseti
- (18) Desa Sentul Kec. Cluwak
- (19) Desa Sekarjalak Kec. Margoyoso
- (20) Desa Gulangpongge Kec. Gunungwungkal

6. Inovasi

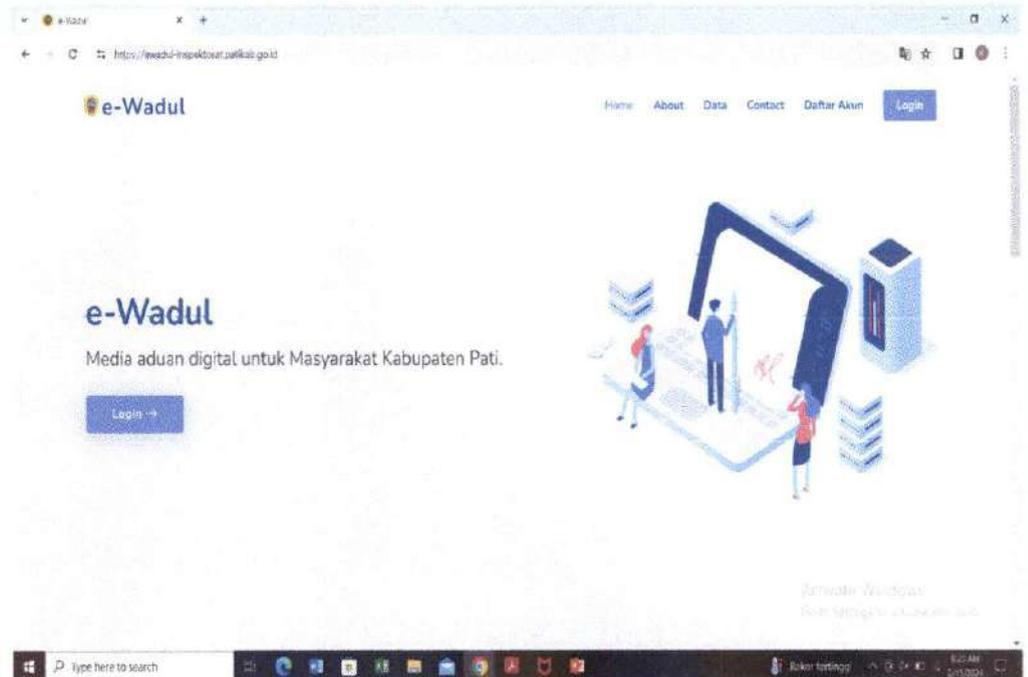
Untuk mendukung kinerja dan memaksimalkan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kab. Pati mempunyai beberapa inovasi yaitu:

- **E-Consulting**



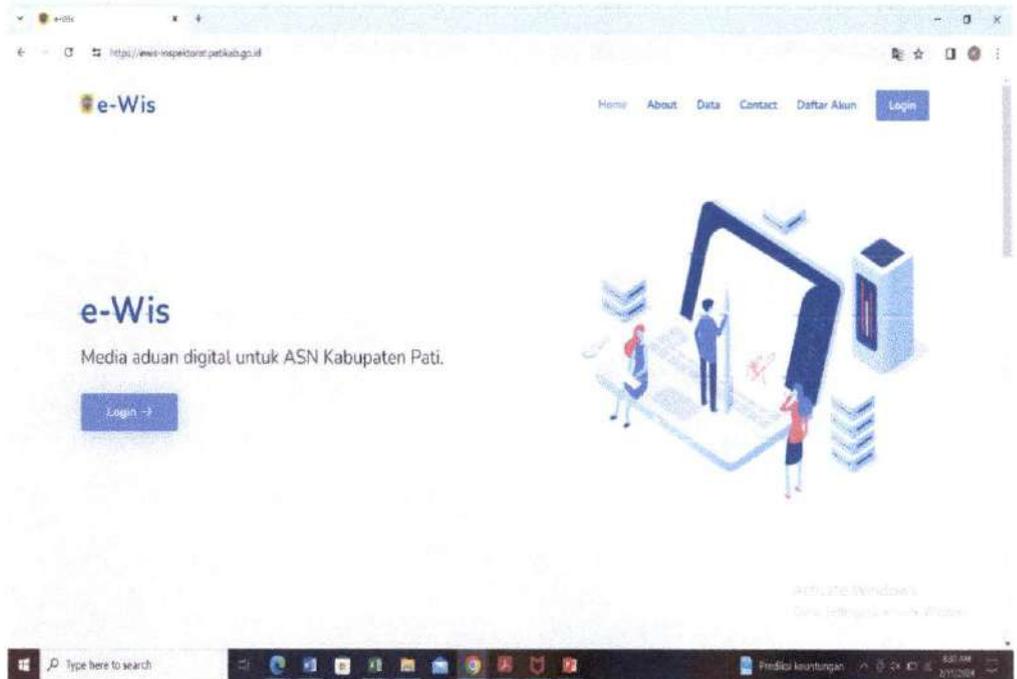
E-Consulting aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kab. Pati sebagai wadah bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk melakukan konsultasi terkait tupoksi. Aplikasi ini dirancang sederhana untuk memudahkan pengguna dan memberikan petunjuk yang jelas bagi konsultan dalam melaksanakan tugasnya, mendukung sistem pengawasan internal pemerintah secara cepat dan akurat

- E-Wadul



E-Wadul merupakan aplikasi bagi masyarakat Kab. Pati untuk menyampaikan aduan permasalahan birokrasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan bisa berupa pengabaian kewajiban atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh ASN dilingkungan Pemerintah Kab. Pati dan yang melaporkan juga harus ASN dilingkungan Pemerintah Kab. Pati.

- e-Wis



e-Wis merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kab. Pati untuk mendukung pengelolaan sistem penanganan pelaporan tindak korupsi (*Whistleblowing* Sistem) di Kabupaten Pati yang memfasilitasi masyarakat dalam mengadukan masalah pelayanan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kualitas pelayanan dan memastikan efektivitas pengaduan serta penegakan birokrasi yang bersih.

- NONGKI

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

BerAKHLAK # bangga meidyani bangsa

G20

KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

NONGKI

...NONGKRONG NGOPI DAN KONSULTASI...

SENIN - KAMIS : 08.00 - 14.30 WIB
JUM'AT : 08.00 - 10.30 WIB

RUANG LINGKUP KONSULTASI

KONSULTASI OPD :

1. Pengelolaan Keuangan OPD
2. Kepegawaian
3. Pengelolaan Aseb
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

KONSULTASI DESA :

1. Pengelolaan Desa
2. Pengadministrasian SPJ
3. Pengelolaan Aseb
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

KONSULTASI SMP/SD :

1. Pengelolaan Keuangan BOS
2. Pengadministrasian SPJ
3. Pengelolaan Aseb
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Salah satu tugas Inspektorat Daerah Kab. Pati adalah memberikan pendampingan dan jasa konsultasi kepada auditee serta untuk menghapus rasa takut, sungkan antara auditee dengan APIP Inspektorat Daerah Kab. Pati maka digagaslah klinik konsultasi yang diberi tagline NONGKI (Nongkrong Ngopi dan Konsultasi) dimana disediakan kopi dan makanan ringan gratis untuk auditan yang berkonsultasi. Auditee dapat konsultasi dengan datang langsung ke Inspektorat Daerah Kab. Pati dan akan dilayani oleh Tim yang sudah dijadwalkan dan bisa berkonsultasi terkait penatausahaan keuangan, BOSP, pajak sesuai tema pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kab. Pati

- ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan



ISO 37001:2016 adalah standar internasional mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan telah dilaksanakan dengan menetapkan serangkaian langkah-langkah dan kontrol yang berurusan dengan penyuapan, standar ini juga dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, serta mendeteksi risiko korupsi.

Dengan diberikannya Serifikat ini kepada Inspektorat Daerah Kab. Pati semakin memperkuat komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

7. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh Inspektorat Daerah Kab. Pati di tahun 2024 adalah Peringkat Terbaik ke-1 (satu) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan dukungan dan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

1. Proses perencanaan yang sudah terinci baik terkait sumber daya manusia, dana maupun pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan terus melakukan langkah perbaikan kedepan,
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target sasaran yang telah direncanakan,
4. Melakukan koordinasi dengan semua objek pengawasan secara optimal dalam upaya pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai jika dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan,
2. Masih adanya temuan berulang dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan,
3. Keterlambatan *auditee* untuk menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :

1. Keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi program dan kinerja berdasarkan indikator, pengukuran kinerja dan sasarannya,
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui diklat pembentukan maupun diklat teknis bagi para APIP,
3. Optimalisasi fungsi perencanaan, pengawasan, Pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
4. Memaksimalkan segala sarana prasarana dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Pati

C. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dokumen perencanaan secara berjangka,
2. Menyusun skala prioritas kegiatan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah,
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak internal maupun eksternal yang mendukung kinerja Inspektorat Daerah Kab. Pati,
4. Meningkatkan kualitas pengawasan / pembinaan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
5. Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan / pembinaan secara efektifitas, efisiensi dan ekonomis.